DISKURSUS PAJAK DAN ZAKAT: KONTEKSTUALISASI DAN APLIKASI DI NEGARA MUSLIM

*Yuli Afriyandi**

Abstract

The problem of tax and tithes (zakat) often make a controversy in Islamic countries. This is because Islam in the Rasulullah era never charged a tax to the Moslem, and only charge zakat. Beside the obligation of tax is charged to the non-Moslem people that live in the Islamic era or Islamic authority. The practice of collecting tax (jizyah and kharaj) in the Nabi SAW era was done by the collector who had a dualism, that is as a zakat collector and also tax. This policy always continued to the next era. Then in the era of Umar bin Abdul Aziz made a new reformation and restructured the system of tax.

Now, a longing with the development of era, the study of zakat and tax including the applying not only in Islamic countries but also non Islamic countries makes a controversy. The thought that appears is how the country must place zakat and tax in order to both have a connection. Indonesia, as a country with the great quantity of Islamic people in the world has a facilitated the obligation of tax to the Islamic people, with has released the regulation about zakat by the government. But in implementing there are many obstacles.

The truly, tax and zakat are two different terms from source side or basic of their collection, but it is as same as the characteristic as an effort to take or pick up the wealth from society for social interest. Zakat for interest has been regulated by religion or Allah SWT whereas tax is used to interest that has regulated by country through a valid democratization process. The difference of implementing both becomes a problem when in particular side there is

* *Followship Islamic Studies Post-Graduat UII Yogyakarta dan Dosen STAI Al-Mukhsin Yogyakarta*

similarity, that is both has a same way obligatory to pay by society. Tax is forced by state's law, but zakat is forced by God.

So that in the system of islamic public finance, zakat and tax must be placed as a different acceptance in a principe, but has a same goal. If it is based on nash-nash, it can be concluded that that nash is valid there is two obligations for Islamic people (particularly Indonesian Moslem), that is obligation to fufill zakat and tax at once.

Keywords: Tax, zakat, public finance.

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai pajak dan zakat seringkali menjadi perdebatan yang panjang di negara-negara Muslim. Persoalan ini disebabkan karena sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah dan masa Khalifah tidak pernah membebankan pajak kepada umat Islam. Umat Islam hanya dibebankan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya. Sementara kewajiban terhadap pajak dibebankan kepada masyarakat non-muslim yang bermukim di wilayah Islam atau wilayah kekuatan Islam.

Fungsi zakat sebagai salah satu sumber pendapatan publik, di zaman Nabi, pajak (*jizyah* dan *kharaj*) juga menjadi pendapatan publik yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan publik. Makna publik di sini tidak hanya dibatasi kepada publik Muslim seperti dalam konsep zakat, tapi publik mengacu kepada makna publik secara umum dengan mengesampingkan afiliasi keagamaan.

Praktik pengumpulan pajak (*jizyah* dan *kharaj*) pada zaman Nabi SAW dilakukan oleh para amil yang memiliki dua peran ganda, sebagai pengumpul zakat dan pajak sekaligus. Kebijakan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, pembangunan dasar-dasar sistem perpajakan mulai terjadi ketika dan setelah pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab. Reformasi dan penataan ulang sistem perpajakan setelah sekian lama rusak, terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.¹

¹ Ali Rahma, "Islam dan Pajak," dalam <http://majalah.hidayatullah.com/?p=1733>, di akses pada 1 November 2012

Di bawah kekhalifahan Umar, sistem kebijakan fiskal Islam mengalami kesuksesan. Efektifnya pengelolaan keuangan negara yang berasal dari zakat, pajak dan sumber-sumber keuangan lainnya, sehingga penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu bukti sukses pemerintahan khalifah Umar.

Kini, seiring perkembangan zaman, diskursus zakat dan pajak terkait aplikasinya baik itu negara Islam maupun negara non Islam menimbulkan perdebatan panjang. Pemikiran yang muncul adalah bagaimana negara harus bisa memposisikan zakat dan pajak supaya ada sinergisitas antara keduanya. Seperti di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan negara Islam yang secara formal memberlakukan syariah Islam, namun ada keterlibatan negara dalam batas tertentu untuk memfasilitasi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya.² Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 29, dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan tersebut bukannya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, dimana negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kewajiban beribadah menurut agama.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat. Disinilah wujud upaya pemerintah dalam memposisikan zakat dan pajak agar bisa bersinergi.

Namun melihat aturan perundang-undangan antara zakat dan pajak seperti pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Undang Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan masih menimbulkan perdebatan mengenai teknis pelaksanaannya.

Oleh karena itu di dalam makalah ini penulis membahas keterkaitan zakat dan pajak dari aspek terminologi dan hukum syar'inya serta aplikasi zakat dan pajak dalam perundang-undangan di Indonesia dan berkaca pada aplikasi zakat dan pajak di beberapa negara muslim.

² Nasaruddin Umar, *"Zakat dan Peranan Negara, Perspektif Hukum Positif di Indonesia," makalah Seminar* tidak diterbitkan, 2010.

B. Perbedaan Konsep Pengertian Zakat dan Pajak

Zakat secara definitif adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,³ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.⁴ Di dalam Al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat,⁵ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Didalam Al-Quran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.⁶

Jika kita tinjau lebih lanjut, zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.⁷ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁸

³ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), h. 231.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 42.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

⁷ *Ibid*, h. 7.

⁸ Tim Redaksi, *Majma Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Daar el-Ma'rif, 1972), Juz I h. 396.

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.⁹ Dalam beberapa mazhab seperti mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai aktifitas mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹⁰

Zakat dalam pandangan mazhab Hanafi hampir mirip dengan mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, zakat didefinisikan dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Kata 'menjadikan sebagian harta sebagai milik' dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Kata 'sebagian harta' dalam definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi bermakna keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.¹¹ Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Kata selanjutnya dari pengertian di atas yakni 'bagian yang khusus'. Hal ini dimaksudkan sebagai kadar yang wajib dikeluarkan. Selanjutnya maksud 'harta yang khusus' adalah *nishab* yang ditentukan oleh syariat. Maksud 'orang yang khusus' ialah para *mustahiqq* zakat.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT.¹²

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai 'penunaian', yakni penunaian hak yang

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 83.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 84.

¹² *Ibid*, h. 85.

wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Sebagaimana zakat, dalam kehidupan bernegara ada peraturan negara yang mewajibkan kepada warga negaranya untuk membayar kewajiban yang bersifat materil menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, kewajiban tersebut adalah pajak.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut para ahli seperti Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.¹³

Istilah pajak menurut pakar ekonomi kontemporer ialah sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Pajak diadakan untuk dialokasikan supaya mencukupi pangan secara umum dan untuk memenuhi keuangan bagi pemerintah. Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pajak adalah pembayaran tunai, artinya bahwa seorang *mukallaf* membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.
2. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak ialah kewajiban yang dipungut dari setiap individual sebagai suatu keharusan.

¹³ "Pengertian hukum pajak," dalam <http://www.klinik-pajak.com/2011/pengertian-pajak-pengertian-hukum-pajak.html>, akses 12 Januari 2012.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 47.

3. Pajak merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang mewajibkan pajak yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
4. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya orang *mukallaf* tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.
5. Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, sehingga tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak.
6. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.

Pajak dan zakat memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa melaksanakan salah satu dari kedua hal tersebut, artinya keduanya harus kita penuhi. Apabila kedua hal tersebut telah kita patuhi sesuai ketentuan, baru kita bisa disebut umat beragama Islam yang taat pada ajaran Islam dan sekaligus warga negara yang bertanggung jawab dan layak kepada pancasila.

Namun seiring perkembangannya, terdapat diskursus dalam hal aplikasi pajak dan zakat dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Seperti Indonesia misalnya, Indonesia bukanlah negara yang meletakkan dasar-dasar Islam dalam peraturan-peraturan penyelenggaraan negara. Olehkarena itu, muncul diskursus yang menuai perdebatan panjang seputar aplikasi zakat dan pajak. Untuk itu, perlu kiranya kita terlebih dahulu memahami titik persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat.

C. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi, ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya.

Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.

1. Persamaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak meskipun kedua-duanya sama adalah merupakan kewajiban dibidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya mempunyai perbedaan sifat dan asas, sumber, sasaran, bagian, kadarnya, prinsip, tujuan, dan jaminannya.

Adapun persamaan antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maka keimanan dan keislamannya belum kuat.
- b) Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah maka zakat pun juga disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
- c) Di antara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.
- d) Jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.

2. Perbedaan Dasar Pajak Dan Zakat

Adapun perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Beda dasar hukum. Dasar hukum zakat adalah al-Qur'an dan sunnah, sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Pajak dan sebagainya.

¹⁵ *Ibid*, h. 49.

- b) Beda status hukumnya. Zakat adalah suatu kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap negaranya.
- c) Beda obyek/sasarannya. Wajib zakat adalah khusus bagi penduduk yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah bagi semua penduduk tanpa pandang agamanya.
- d) Beda kriterianya. Criteria pendapatan dan kekayaan yang terkena zakat dan pajak, prosentasinya dan jatuh temponya tidaklah sama. Misalnya presentasi penghasilan dan dizakati adalah antara 2,5 %-20 % tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesinya, yang sudah ditentukan kadarnya oleh agama dan tidak bisa berubah-ubah, sedangkan prosentase penghasilan yang terkena pajak di Indonesia dewasa ini sekitar 15%-25%. Dan sudah tentu kriteria wajib pajak juga besarnya tarif pajak bisa berubah-ubah.
- e) Beda pos-pos penggunaannya. Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/*ashnaf* yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.
- f) Beda hikmahnya. Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda wajib zakat, untuk meratakan pendapatan di kalangan masyarakat (agar tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sedangkan hikmah pajak adalah untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridha Allah SWT.

Abu Ubayd dalam kitabnya *al-Amwal* menyebutkan zakat mempunyai karakteristik yang khas. Satu sisi, mereka yang ditetapkan berhak menerima zakat hanya dibatasi kepada kelompok-kelompok yang disebutkan Qur'an, dan karenanya pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain, dan di sisi lain, pendapatan zakat juga dipisahkan dari pajak (*fay'* atau *kharaj*) dan tidak dicampur dengannya. Lebih lanjut, zakat dibedakan dari pendapatan publik umum yang diperoleh dari *fay'* dalam arti bahwa sifat *fay'* dari

sudut pandang pembayarannya adalah murni politis, sementara zakat dari sudut pandang pembayarannya memiliki karakter politik sekaligus religius.

Karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi keuangan publik. Namun, ia merupakan institusi keuangan publik yang khas karena ia memiliki karakter religius.¹⁶ Berbeda dengan pajak yang menurut Abu Ubayd merupakan bersifat murni politis.

Pajak menurut Yusuf Qardhawi merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai.¹⁷

Menurut Gazi Inayah, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Definisi pajak dalam ketentuan syariat dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan /kekurangan baitul maal, dapat dihapus jika keadaan baitul maal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.¹⁸

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Ugi Suharto, *Keuangan...*, h. 188.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah, Muassasat ar-Risalah*, Beirut, Libanon, Cet. Ke II, 1973, Terj. Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1999), h. 998.

¹⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 33.

- 1) Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.
- 2) Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
- 3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
- 4) Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

3. Pembayaran Zakat dan Pajak

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan mustahik secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹⁹

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-udangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan kemanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat.*, h. 60.

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut.²⁰

Pertama, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 177 yang artinya sebagai berikut:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Imam al-Qurthubi²¹ ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (*...“dan memberikan harta yang dicintainya...”*) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin walaupun sudah menunaikan zakat memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.

Kedua, perintah dari *ulil amri* (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak. Muhammad Ali ash-Shabuni²² ketika menafsirkan ayat surah an-Nisa’ ayat 59 menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum muslimin yang berpegang

²⁰ *Ibid*, h. 61.

²¹ Al-Qurthubi, *al-Jaami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Daar el-Kuhb al-‘ilmiyah, 1993), h. 162.

²² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafaasir*, (Beirut Lebanon: Daar el-Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1993), Jilid I, h. 285.

teguh pada syariat Islam, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Khaliq (Allah SWT).

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana dinyatakan didalam surah al-Ma'idah ayat 2.

Keempat, kaidah-kaidah umum hukum syara'. Yusuf al-Qardhawi²³ menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara'. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama bahaya. Menurut mazhab Maliki,²⁴ bahwa berdasarkan prinsip al-mashalah al-mursalah jika sewaktu-waktu Baitul Maal mengalami defisit, sedang kebutuhan untuk membiayai tentara meningkat dan *Baitul Maal* (anggaran negara) tidak mampu membiayainya, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang kaya, harta secukupnya, sampai Baitul Maal terisi kembali, atau dapat mencukupi.

Menurut mazhab Maliki, pemerintah yang adil hendaklah melaksanakan pungutan ini secara teratur pada musim panen atau saat mengetam buah-buahan, hingga tidak menyulitkan orang-orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega.

Atas dasar inilah dapat disimpulkan bahwa sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus. Jika kemudian ada diskursus mengenai mekanisme yang telah di atur dalam Undang-undang terkait dengan teknis pelaksanaannya akan penulis bahas pada bab selanjutnya.

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah*, h. 1072.

²⁴ Ibn Idris al-Qurafi, *al-Dzahirah* (Beirut: Daar el-Ghurob Al-Islamy, 1994), Juz III, h. 79.

D. Diskursus Zakat dan Pajak dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan pajak secara khusus termaktub di dalam pasal 22 yang berbunyi: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Selanjutnya di dalam pasal 23 lebih detil dijelaskan teknisnya yang dibagi dalam dua ayat yakni:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

UU No. 23 tentang pengelolaan zakat ini sebetulnya masih menuai kritikan dari berbagai pihak. Ada beberapa pasal seperti Pasal 5 Ayat (1) UU No.23/2011 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan operator tunggal pengelolaan zakat.

Selain itu UU No. 23 ini juga menimbulkan perdebatan, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi perdebatan dalam UU Pengelolaan Zakat, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amil zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat.²⁵

Penjelasan UU 23 2011 menempatkan pemerintah melalui BAZNAS (Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai pengelola tunggal zakat di Indonesia dengan fungsi perencanaan-pengendalian-pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sementara itu, LAZ diposisikan sebagai ‘pembantu’ BAZNAS.

Negara sebagai pengelola tunggal zakat tentu merujuk pada banyak nash dan hadits yang menjelaskan zakat adalah domain pemerintah, namun juga karena pada akhirnya pengelola zakat memiliki sumber-

²⁵ Hamid A. Chalid, “Masa Depan Zakat: Kritik terhadap UU Pengelolaan Zakat, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/313411/akademisi-uu-pengelolaan-zakat-perlu-ditinjau-ulang/> di akses 20 November 2012.

sumber daya yang lengkap untuk memastikan pengelolaan zakat mencapai tujuannya. Maka bila pengelolaan zakat berada di Negara, pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk alokasi sumberdaya diatas, sehingga zakat yang masih belum seberapa dapat fokus pada sisi-sisi yang lebih mendasar dan strategis.

Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah 'satu pintu' akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh.

2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat (1) point g menyebut: "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Agama Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari'at Islam, zakat perusahaan dihitung dari Laporan Neraca, bukan dari Laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Akan tetapi, dalam pasal 9 ayat (1) poin g UU No. 17 tahun 2000 tersebut, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda, dapat menjadi kenyataan.²⁶

Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain:

²⁶ Muktiyanto, "Zakat sebagai Pengurang Pajak," *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 2, September 2008, h. 100-112

- a. Akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.
- b. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- c. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.
- d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Mengenai pajak penghasilan dapat juga kita lihat dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a.1. Tentang pengecualian objek pajak penghasilan yang berbunyi; “yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Keterkaitan Zakat dan Pajak dalam Panduan Teknis Pelaksanaan

Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” sejak ditetapkannya Kep-DJP No. KEP-163/PJ/2003 sebagai panduan perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak penghasilan yang merupakan penjabar pasal 4 ayat (3) huruf a.1. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan yang sudah disahkan. Kebijakan tersebut benar dilakukan dengan adanya item “Zakat atas Penghasilan yang menjadi Objek Pajak” dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada bagian A.6. (Penghasilan Neto Zakat Atas Penghasilan yang Menjadi Obyek Pajak).

Sedangkan sebagai bukti pembayaran zakat yang sudah dilakukan, pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mewajibkan wajib pajak melampirkan kuitansi pembayaran zakat dari OPZ tempat wajib pajak membayar zakat dimana OPZ tersebut adalah OPZ yang disahkan pendiriannya oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia. Persyaratan ini adalah sesuai dengan yang diatur dalam Kep-DJP No. KEP-163/PJ/2003 pasal 1 ayat (1), bahwa: “Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak...” Pernyataan “nyata-nyata” adalah tuntutan adanya bukti pembayaran zakat oleh wajib pajak yang harus dapat diperlihatkan dan dilampirkan untuk dijadikan sebagai bukti. Lampiran tersebut bisa berupa bukti asli maupun fotokopi.

Namun terdapat beberapa kendala dalam teknis pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kendala tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- Wajib pajak melakukan pembayaran zakat tidak melalui OPZ yang sudah disahkan oleh pemerintah, baik itu BAZ maupun LAZ melainkan dibayarkan secara langsung kepada *mustahiq* dan atau kepada lembaga amal zakat yang tidak disahkan pendiriannya oleh pemerintah, misalnya lembaga pengelola zakat masjid. Perilaku tersebut mengakibatkan Wajib Pajak tidak bisa menjadikan zakat yang sudah dibayarkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

²⁷ Rahmani Timorita Yulianti, “mata kuliah Keuangan Publik Islam,” dalam diktat kuliah MSI UII Yogyakarta, 2012.

- Keengganan sebagian wajib pajak mencantumkan jumlah zakat yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan zakat yang dikeluarkan adalah dari seluruh penghasilan yang dia peroleh. Sedangkan, adanya rasa enggan membayar pajak menyebabkan Wajib Pajak cenderung melaporkan hanya sebagian penghasilan yang dia peroleh dengan pertimbangan pajak yang akan dibayarkan adalah kecil.
- Kedudukan zakat yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT. menjadikan Wajib Pajak lebih bersikap jujur akan penghasilan yang diperolehnya. Namun, karena pajak hanya sebagai kewajiban kepada negara, maka Wajib Pajak hanya merelakan sebagian penghasilan mereka untuk membayar pajak.

E. Aplikasi Zakat dan Pajak di Beberapa Negara Muslim

1. Arab Saudi

Di Arab Saudi zakat dan pajak sudah sangat terkelola. Zakat dan pajak ditangani oleh satu departemen. Departemen tersebut dinamakan Departemen Zakat dan Pajak (*Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhil*).

Di Negara Arab Saudi, pembayaran zakat dan pajak diatur dengan keputusan Raja yang berlaku bagi segenap penduduk yang bermukim di Arab Saudi. Jika sudah membayar zakat tidak ditarik pajak lagi begitupun sebaliknya, sehingga warga tidak membayar kewajiban ganda. Uang dari pajak akan digunakan untuk membiayai kelangsungan Negara. Sedangkan zakat akan disalurkan melalui Departemen Sosial sesuai peruntukannya.

Arab Saudi tidak mengenal pajak pendapatan pribadi. Tetapi, Arab Saudi memiliki sejumlah pajak atas pendapatan bisnis. Kendati Arab Saudi tidak mengenal pajak atas pendapatan pribadi, tetapi warga Saudi dikenai pajak yang dinamakan zakat, yang dikenakan atas keuntungan bersih dari asset. Adapun warga non-Arab Saudi dikenai pajak berdasarkan atas pendapatan bisnis mereka. Pendapatan warga asing tertentu kemungkinan dikenai pajak apabila kegiatannya berhubungan dengan bisnis baik di dalam maupun di luar Arab Saudi. Namun jika pendapatan bisnis ini didapat di luar dan tidak ada kaitannya dengan bisnis di Arab Saudi, maka pendapatan tersebut tidak dikenai pajak.²⁸

²⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 347.

Kewenangan resmi untuk menghimpun zakat terpusat hanya pada pemerintah. Setiap perusahaan yang telah membayarkan zakatnya kepada Badan Zakat akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah membayarkan zakat. Perusahaan yang memiliki sertifikat pembayaran zakat akan dimudahkan untuk perpanjangan izin usaha. Perusahaan yang tidak memiliki sertifikat pembayaran zakat, tidak akan diperpanjang izinnya. Perusahaan yang dimiliki bukan oleh warga negara Arab Saudi diwajibkan membayar pajak. Jadi zakat dibayarkan oleh perusahaan milik muslim, sementara pajak dibayarkan oleh perusahaan milik non muslim.

Pengumpulan zakat dan pajak menggunakan *online system*. Badan Zakat dan Pajak memiliki pusat data dan informasi yang lengkap dan didukung perangkat ICT (*Information and Communication Technology*). Sekitar 70 persen dari penerimaan Badan Zakat dan Pajak Arab Saudi saat ini berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi disana.

Dalam penyalurannya, untuk zakat disalurkan khusus kepada delapan asnaf melalui Kementerian Sosial Arab Saudi yang berkewenangan membiayai pengeluaran keamanan sosial. Sedangkan penerimaan pajak masuk ke dalam rekening penerimaan pajak.

2. Malaysia

Di Negara mayoritas Muslim lainnya seperti di Malaysia, mekanisme zakat pengurang pajak sudah sangat jelas, Pajak akan langsung mengalir ke Pemerintah dan zakat ke lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya, zakat secara langsung mengurangi pajak. Dan faktanya, dengan mekanisme tersebut, penerimaan zakat di Malaysia cenderung naik pada saat bersamaan penerimaan pajak juga mengalami peningkatan.²⁹

3. Kuwait

Hal menarik berkaitan dengan aplikasi pajak dan zakat yang dilakukan oleh Negara muslim lainnya adalah Kuwait. Kuwait masih menerapkan aplikasi tradisional zakat yaitu dengan mewajibkan zakat sejak awal abad ke 20, (Fu'ad al'Umar: 1985). Pemilik ternak dan petani dibebankan zakat sesuai dengan syariat. Selain itu, pajak juga dikenakan pada produk-produk perikanan pada tingkat zakat yang sama. Karena Kuwait tidak

²⁹ www.republika.co.id, akses September 2012.

memiliki pajak penghasilan atau kekayaan, tindakan tersebut tidak membuat referensi apapun untuk konsesi pajak juga tidak menyebutkan kerahasiaan catatan dan informasi zakat.

4. Uni Emirat Arab

Di Negara Uni Emirat Arab pendapatan pemerintah berasal penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang dipungut dari pendapatan atau keuntungan. Pajak hanya dikenakan karena impor dan beberapa biaya pelayanan publik, seperti kesehatan, dan komunikasi, bwersumber dari penerimaan utama dari minyak. Tetapi, terdapat juga sumber penerimaan lain, yaitu;

- a. Penerimaan atas pelayanan pemerintah
- b. Penerimaan dari usaha pemerintah seperti investasi lokal dan luar negeri dan *real estate*
- c. Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bekerja sama dengan pihak swasta
- d. Bea impor dan pajak tembakau.

F. Penutup

Sebagai penutup dalam makalah ini penulis menyimpulkan bahwa Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi masalah ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Pajak dipaksa hukum Negara, Zakat dipaksa hukum Tuhan.

Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam. Sementara pajak baru dalam keuangan publik dalam sistem ekonomi konvensional diperiksa berdasarkan

prinsip yang berbeda. Salah satu prinsip yang digunakan dalam sistem ekonomi keuangan publik konvensional adalah prinsip keadilan. Dalam keuangan publik, kata keadilan didefinisikan sebagai masalah 'etika' yang penuh pertimbangan nilai. Untuk itu, mereka menentukan beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penilaian nilai manfaat. Diakui, sistem analisis dalam sistem keuangan publik Islam tidak semaju analisis pada keuangan publik konvensional. Masih perlu bekerja keras untuk mengembangkan ide-ide yang berhubungan dengan keuangan publik Islam.

Oleh karena itu didalam sistem keuangan publik Islam, pajak dan zakat harus diposisikan sebagai penerimaan yang berbeda secara prinsip namun memiliki kesamaan tujuan. Dan jika merujuk pada nash-nash dapat disimpulkan bahwa sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

Dalam tataran perundang-undangan zakat dan pajak di Indonesia masih menuai perdebatan terkait sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amal zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat. Perlu ada upaya pemahaman dari banyak pihak agar teknis pengaplikasian aturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid al-Kasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 1999.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Huda, Nurur dkk, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2012.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*; Terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab*, Dar Al-Andalus Al-Khadra' Jeddah. 2010.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PSZ Islamic Business School, 2004.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000.
- www.republika.co.id
- www.pajak.go.id